

Community Based Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Bali

I Wayan Wiwin

**Program Studi Industri Perjalanan
Fakultas Dharma Duta IHDN Denpasar
wiwinkayoan@gmail.com**

Diterima 15 April 2018, direview 15-20 April 2018, diterbitkan 25 April 2018

Abstract

The tourism industry is currently growing, the potential of natural and culture resources continues to be developed as a tourist attraction. Tourism is not only owned by the government or entrepreneurs, tourism should also be owned by the local community. Therefore, tourism should be developed with a community-based concept. Community-based tourism is a form of tourism where local communities have control and are involved in development and management, and the proportion of benefits remains largely in the hands of local communities. Bali as one of the world's best tourist destinations has done just that. Many tourist attractions in Bali have been managed with the concept of community-based tourism, such as Pandawa Beach and Kedonganan Beach in Badung regency, Tanah Lot in Tabanan regency, Monkey Forest Ubud and Ceking Rice Terraces in Gianyar Regency, and Penglipuran Village in Bangli Regency. CBT has been proven to improve the economy of local communities and be able to conserve natural and culture resources.

Keyword: Community Based Tourism, Pengembangan, Pariwisata Bali

1. Pendahuluan

Pariwisata saat ini menjadi fenomena yang menjadi perhatian masyarakat dunia, gejala pariwisata yang pada awalnya oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai kebutuhan tersier, namun saat ini sudah mewabah menjadi bagian dari kebutuhan dasar masyarakat dunia. Hal ini disebabkan karena perkembangan dunia modern yang menuntut manusia untuk senantiasa beraktifitas dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga ketersediaan waktu luang (*leisure time*) menjadi sedikit. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap psikologis masyarakat, terlebih lagi masyarakat urban di perkotaan, yang kesehariannya sibuk dengan pekerjaannya sehingga sesekali membutuhkan perjalanan wisata untuk sekedar melepaskan diri dari rutinitas dan melakukan *refreshing*.

Kegiatan perjalanan wisata menjadi sebuah komoditas yang sangat menjanjikan untuk dikemas menjadi sebuah usaha bisnis. Banyak Negara di dunia mulai serius untuk menggarap sektor pariwisata sebagai sektor andalan untuk meningkatkan perekonomiannya, tidak terkecuali Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan budaya sebagai potensi daya tarik wisata.

Saat ini, sektor pariwisata Indonesia berkontribusi untuk kira-kira 4% dari total perekonomian. Pada tahun 2019, Pemerintah Indonesia ingin meningkatkan angka ini dua kali lipat menjadi 8% dari PDB, sebuah target yang ambisius (mungkin terlalu ambisius) yang mengimplikasikan bahwa dalam waktu empat tahun mendatang, jumlah pengunjung perlu ditingkatkan dua kali lipat menjadi kira-kira 20 juta. Dalam rangka mencapai target ini, Pemerintah akan berfokus pada memperbaiki infrastruktur Indonesia (termasuk infrastruktur

teknologi informasi dan komunikasi), akses, kesehatan & kebersihan dan juga meningkatkan kampanye promosi online (*marketing*) di luar negeri (Indonesia-investments, 2018).

Sejak pemerintah Indonesia menetapkan pariwisata sebagai sektor unggulan pembangunan nasional, dunia pariwisata Indonesia menjadi salah satu sektor ekonomi terbesar dan tercepat pertumbuhannya. Bahkan, pariwisata menjadi *core economy* Indonesia ke depan. Pariwisata merupakan komoditas yang paling berkelanjutan dan menyentuh hingga ke level bawah masyarakat.

Bali sebagai salah satu destinasi pariwisata dunia, terus berbenah untuk menangkap peluang tersebut. Sebagai bagian dari kepulauan nusantara, Pulau Bali memiliki kekhasan sumber daya alam dan budaya, yang membuatnya terkenal ke mancanegara, bahkan namanya jauh lebih terkenal dibandingkan Indonesia dengan predikat “*The Paradise Island*” atau sebutan “*The Island of God*”. Hal ini terlihat dari semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Bali, bahkan pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 5,3 juta orang. Tingginya jumlah kunjungan wisatawan tersebut, sepadan dengan berbagai penghargaan internasional di bidang pariwisata yang pernah diraih oleh Bali, yang terbaru yaitu pada tahun 2017 Pulau Bali kembali dinobatkan sebagai Destinasi Terbaik Dunia versi TripAdvisor yang setiap tahunnya mengeluarkan daftar tempat wisata terbaik di dunia, regional maupun tiap negara. Daftar “*The World’s Best Destination with Travellers Choice*” tersebut berdasarkan ulasan para pengguna TripAdvisor dimana Bali menempati ranking pertama dalam kategori Destinasi Wisata Dunia tahun 2017. (Pesona Travel, 2017).

Peluang tersebut merangsang semua *stakeholders* yang terkait untuk terus berupaya mengembangkan segala potensi sumber daya yang dimiliki, tidak terkecuali masyarakat Bali sendiri yang secara swadaya maupun kerjasama dengan *stakeholders* terkait terus berinovasi menciptakan daya tarik dan atraksi wisata baru untuk mendatangkan wisatawan sehingga cita-cita pengembangan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian daerah dan taraf hidup masyarakat dapat terwujud. Hasil pariwisata jangan sampai hanya dinikmati oleh sebagian kalangan saja, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat lokal sebagai objek sekaligus subjek dari aktivitas pariwisata itu sendiri. Oleh karenanya dewasa ini mulai muncul gerakan-gerakan swadaya masyarakat untuk membangun dan mengembangkan potensi wisata di daerahnya masing-masing, mulai dari kepemilikan (*ownership*) sumber daya pariwisata, pengelolaan (*management*), dan kontrol (*control*). Gerakan ini sesuai dengan konsep pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat atau dikenal dengan istilah *Community Based Tourism* (CBT).

Melalui pengembangan CBT diharapkan industri pariwisata dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih mensejahterakan masyarakat. Secara global CBT tidak sekedar pengembangan pariwisata melainkan juga dikembangkan sebagai bagian dari program penanggulangan masalah kemiskinan.

2. Pembahasan

2.1. Prinsip Dasar *Community Based Tourism* (CBT)

Di Indonesia CBT diterapkan antara lain dalam pengembangan daya tarik wisata alam maupun budaya. Masyarakat menduduki posisi sebagai bagian integral yang ikut berperan, baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan itu sendiri. Masyarakat merupakan pelaku langsung kegiatan pariwisata dalam hal pengelolaan sumber daya alam dan budaya sehingga memiliki komitmen yang kuat untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan karena menyangkut kepentingan hidup mereka. Masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari atraksi pariwisata sehingga pengembangan pariwisata tidak bisa dilakukan tanpa melibatkan masyarakat. Pariwisata berbasis masyarakat memiliki berbagai kelebihan baik dari aspek pengembangan masyarakat maupun industri pariwisata. Namun keberhasilan penerapan CBT sangat tergantung karakteristik dan kondisi masyarakat/komunitas di destinasi wisata sehingga model pelaksanaan CBT di wilayah satu dengan lainnya berbeda.

Community Based Tourism (CBT) muncul sebagai sebuah alternatif dari arus utama (*mainstream*) pengembangan pariwisata. Hausler (2005) dalam *Tourism Forum International* mendefinisikan CBT sebagai bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pengembangan pariwisata. Menurut Hausler (2005:1) terdapat tiga unsur penting CBT yaitu keterlibatan masyarakat lokal dalam manajemen dan pengembangan pariwisata, pemerataan akses ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat serta pemberdayaan politik (*capacity building*) masyarakat lokal yang bertujuan meletakkan masyarakat lokal sebagai pengambil keputusan.

Anstrand, 2006 (dalam Suansri, 2003:14) mendefinisikan *Community Based Tourism* (CBT) sebagai pariwisata yang memperhitungkan dan menempatkan keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya, diatur dan dimiliki oleh komunitas, untuk komunitas. Anstrand (2006:14) mencoba melihat CBT bukan dari aspek ekonomi terlebih dahulu melainkan aspek pengembangan kapasitas komunitas dan lingkungan, sementara aspek ekonomi menjadi '*induced impact*' dari aspek sosial, budaya dan lingkungan. Suansri (2003:14) menguatkan definisi CBT sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya dalam komunitas. CBT merupakan alat bagi pembangunan komunitas dan konservasi lingkungan.

Pantin dan Francis, 2005 (dalam Nurhidayati, 2012:17) menyusun definisi CBT sebagai integrasi dan kolaborasi antara pendekatan dan alat (*tool*) untuk pemberdayaan ekonomi komunitas, melalui *assessment*, pengembangan dan pemasaran sumber daya alam dan sumber daya budaya komunitas. Demartoto dan Sugiarti (2009:19) mendefinisikan CBT sebagai pembangunan pariwisata dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sedangkan menurut penulis konsep pengembangan CBT adalah pengembangan pariwisata yang mensyaratkan adanya akses, partisipasi, control dan manfaat bagi komunitas dalam aspek ekonomi, social, budaya, politik dan lingkungan.

Prinsip dasar CBT menurut UNEP dan WTO (2005) sebagai berikut. (1) mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata ; (2) mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek; (3) mengembangkan kebanggaan komunitas; (4) mengembangkan kualitas hidup komunitas; (5) menjamin keberlanjutan lingkungan; (6) mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal ; (7) membantu berkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas; (8) menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia; (9) mendistribusikan keuntungan secara adil kepada anggota komunitas ; dan (10) berperan dalam menentukan prosentase pendapatan (pendistribusian pendapatan) dalam proyek-proyek yang ada di komunitas.

Prinsip-prinsip CBT dari UNEP dan WTO dapat dikategorikan dalam prinsip sosial (poin 2,3,4) yang berkaitan dengan kualitas internal komunitas, prinsip ekonomi (poin 1,9) yang berkaitan dengan kepemilikan usaha pariwisata dan pendistribusian keuntungan/pendapatan kepada anggota komunitas, prinsip budaya (poin 6,7,8,) yang berkaitan dengan upaya mempertahankan dan toleransi budaya melalui kegiatan pariwisata, prinsip lingkungan (poin 5) berkaitan dengan terjaganya kualitas lingkungan dan kegiatan pariwisata dan prinsip politik (poin 10) yang berkaitan dengan kekuasaan untuk ikut menentukan prosentase pendapatan (pendistribusian pendapatan) .

Sementara itu menurut Hatton (1999: 2) prinsip CBT dapat dikategorikan menjadi 4 yaitu sosial, ekonomi, budaya dan politik. Prinsip sosial menurut Hatton berkaitan otorisasi kepada komunitas untuk memberi ijin, mendukung, membangun dan mengoperasikan kegiatan wisata yang ada di wilayahnya. Prinsip ekonomi berkaitan dengan sistem pembagian keuntungan yang timbul dari pengembangan industry pariwisata. Berkaitan dengan prinsip ekonomi Hatton menterjemahkan dalam 3 bentuk yaitu (1) *joint venture* dalam usaha pariwisata dimana dari keuntungan yang diperoleh wajib menyisihkan keuntungan bagi

komunitas (berupa CSR atau dana bagi hasil); (2) asosiasi yang dibentuk komunitas untuk mengelola kegiatan wisata dimana keuntungannya juga dibagikan kepada komunitas; (3) usaha kecil/menengah yang merekrut tenaga kerja dari komunitas. Hatton tidak merekomendasikan usaha individu dalam CBT karena dikhawatirkan keuntungan kegiatan pariwisata hanya dirasakan oleh anggota komunitas yang terlibat sedangkan yang tidak terlibat dalam usaha/kegiatan pariwisata tidak mendapat keuntungan. Prinsip budaya mensyaratkan adanya upaya menghargai budaya lokal, *heritage* dan tradisi dalam kegiatan pariwisata. CBT harus dapat memperkuat dan melestarikan budaya lokal, *heritage* dan tradisi komunitas. Sedangkan prinsip politik berkaitan dengan peran pemerintah lokal dan regional diantaranya dalam membuat kebijakan sehingga prinsip sosial ekonomi, budaya dan dapat terlaksana.

Nederland Development Organisation (SNV) mengemukakan empat prinsip CBT yaitu (1) ekonomi yang berkelanjutan, (2) keberlanjutan ekologi, (3) kelembagaan yang bersatu, (4) keadilan pada distribusi biaya dan keuntungan pada seluruh komunitas. Dengan mengadopsi definisi tersebut SNV menetapkan empat prinsip dasar CBT yaitu berkaitan dengan keberlanjutan ekonomi, ekologi, penguatan kelembagaan dan pembagian keuntungan yang adil bagi semua anggota komunitas. Prinsip keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan adanya jaminan bahwa CBT mampu menciptakan mekanisme yang dapat menjaga perekonomian tetap sehat dan berkesinambungan sehingga pariwisata dapat diandalkan untuk meningkatkan pendapatan/kesejahteraan komunitas. Prinsip keberlanjutan ekologi berkaitan dengan upaya untuk menjaga agar kualitas lingkungan dapat dipertahankan. Penguatan kelembagaan salah satu prinsip penting karena kelembagaan adalah *tool* bagi seluruh anggota komunitas untuk mendapatkan akses untuk menjadi pemegang keputusan (Nurhidayati, 2012).

Dengan mengacu pada prinsip dasar dari CBT dari UNEP dan WTO, Suansri (2003:21-22) mengembangkan lima prinsip yang merupakan aspek utama dalam pengembangan *Community Based Tourism/CBT* di Thailand. Pertama, prinsip ekonomi dengan indikator timbulnya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata dan timbulnya pendapatan masyarakat lokal. Kedua, prinsip sosial dengan indikator terdapat peningkatan kualitas hidup, adanya peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil antara laki-laki perempuan, generasi muda dan tua dan terdapat mekanisme penguatan organisasi komunitas. Ketiga, prinsip budaya dengan indikator mendorong masyarakat untuk menghormati budaya yang berbeda, mendorong berkembangnya pertukaran budaya dan adanya budaya pembangunan yang melekat erat dalam budaya lokal. Keempat, prinsip lingkungan dengan indikator pengembangan *carrying capacity area*, terdapat sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan dan adanya kepedulian tentang pentingnya konservasi. Kelima, prinsip politik dengan indikator terdapat upaya peningkatan partisipasi dari penduduk lokal, terdapat upaya untuk meningkatkan kekuasaan komunitas yang lebih luas dan terdapat mekanisme yang menjamin hak-hak masyarakat lokal dalam pengelolaan SDA. Kelima prinsip tersebut merupakan wujud terlaksananya pariwisata yang berkelanjutan.

Prinsip CBT yang disampaikan Suansri (2003) memiliki spektrum yang cukup luas. Dalam prinsip ekonomi misalnya Suansri tidak hanya membahas terciptanya lapangan kerja dan timbulnya pendapatan masyarakat namun juga memperlihatkan perlunya dana komunitas atau dana bersama yang dapat bermanfaat untuk seluruh komunitas baik yang berhubungan langsung dengan industry pariwisata atau tidak. Dalam prinsip ekonomi Suansri mengembangkan spectrum CBT tidak hanya terkait dengan anggota komunitas yang berkaitan langsung dalam industry pariwisata tetapi seluruh komunitas sebagai sebuah kesatuan. Dalam hal ini Suansri tidak hanya memikirkan kebutuhan praktis (jangka pendek) komunitas tetapi juga kebutuhan strategis (jangka panjang).

Dalam prinsip sosial Suansri juga mempertimbangkan kebutuhan strategis komunitas yaitu mencapai kualitas hidup yang lebih baik melalui pengembangan pariwisata. Dalam

kualitas hidup tercakup aspek pendidikan dan kesehatan sebagai investasi bagi kualitas komunitas ke depan. sementara untuk kebutuhan praktis Suansri melihat pentingnya keadilan gender, keterlibatan semua generasi dan peningkatan kebanggaan local. Dengan demikian spectrum yang diangkat Suansri mewakili sebagian unsur dalam komunitas yaitu gender dan lintas generasi. Dalam pandangannya Suansri melihat bahwa komunitas merupakan kesatuan dari berbagai unsur yang membentuk yaitu individu dengan berbagai latar belakang. Suansri melihat aspek yang jarang diperhatikan ahli lain dalam melihat komunitas yaitu aspek gender yang terkait dengan peran-peran yang dikonstruksi masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan terkait dengan pengembangan pariwisata.

Prinsip budaya dari Suansri juga melihat aspek budaya secara mendalam yaitu adanya budaya pembangunan yang berkembang dengan adanya pengembangan pariwisata, terjadi pertukaran budaya dan penghormatan terhadap budaya lain. Sedangkan prinsip politik yang dijadikan indikator oleh Suansri mencakup *spectrum* internal dan eksternal. Internal berkaitan dengan komunitas itu sendiri yaitu adanya partisipasi lokal dan perluasan kekuasaan komunitas. Sedangkan mekanisme yang menjamin hak komunitas lokal dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan aspek eksternal yang melibatkan regulasi pemerintah dan stakeholder lainnya.

Dari prinsip lingkungan Suansri memiliki perhatian khusus pada kepedulian pada konservasi tidak hanya berkaitan dengan pengembangan daya dukung lingkungan dan sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan. Disini Suansri memiliki pandangan tentang pentingnya partisipasi semua pihak dalam melakukan konservasi pada lingkungan di destinasi wisata.

2.2. Pengembangan *Community Based Tourism* (CBT) di Bali

Sebagai salah satu destinasi wisata terbaik dunia, Bali memiliki potensi sumber daya pariwisata yang sangat besar. Masyarakat Bali mulai mengakui bahwa sektor pariwisata merupakan sektor andalan yang harus digarap sungguh-sungguh, untuk itu diperlukan adanya usaha bersama untuk mewujudkannya melalui pembangunan masyarakat berbasis CBT.

Proses pembangunan masyarakat berbasis CBT tidak terwujud begitu saja, melainkan dilaksanakan melalui pendekatan konsep dan strategi yang terarah, konsisten dan berkesinambungan. Aref dan Redzuan (2009), memberikan tahapan *capacity building* melalui tahapan pengembangan dan pemberdayaan *the ability to act*, dari peranan individual ke tingkat kelompok, kemudian memasuki proses yang lebih luas yaitu komunitas masyarakat. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan anggota komunitas yang memiliki kecakapan khusus, dapat ditingkatkan peranan mereka untuk memasuki komunitas bisnis, dimana mereka memiliki kecakapan yang memadai dalam ikut serta melaksanakan proses perencanaan dan pengendalian bersama. Kecakapan anggota komunitas dalam proses pengambilan keputusan ini kemudian ditingkatkan perannya sebagai pemilik atas kegiatan bisnis, maka pada industri pariwisata, maka peranan anggota dalam komunitas adalah sebagai pemilik atas kegiatan industri. Kepemilikan ini yang selanjutnya dikenal sebagai industri pariwisata berbasis masyarakat CBT (Akama dan Kieti, 2007).

Pariwisata berbasis masyarakat adalah bentuk kepariwisataan dimana komunitas lokal memiliki kontrol dan terlibat dalam pembangunan dan pengelolaannya, dan proporsi manfaat sebagian besar tetap berada di tangan komunitas masyarakat lokal. Putra (2015) menyebutkan setidaknya ada empat prinsip yang harus dipenuhi dalam pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat di Bali, yaitu : (1) inisiatif pengelolaan CBT datang dari bawah dan dilakukan secara kelembagaan di bawah payung desa adat/pakraman; (2) desa menjadi pemilik destinasi wisata yang ada di wilayahnya dan dikelola melalui yayasan atau badan pengelola; (3) keuntungan financial digunakan untuk pembangunan desa dan pembiayaan kegiatan adat keagamaan serta disalurkan kepada masyarakat melalui lembaga-lembaga yang relevan; dan (4) peluang kerja dan usaha diutamakan untuk masyarakat local.

Terdapat beberapa contoh daya tarik wisata di Bali yang berhasil mengadopsi konsep *Community Based Tourism* (CBT), seperti : Pantai Pandawa dan Pantai Kedonganan di Kabupaten Badung, Tanah Lot di Kabupaten Tabanan, Monkey Forest Ubud dan Terasering Ceking di Kabupaten Gianyar, serta Desa Wisata Penglipuran di Kabupaten Bangli.

Keberhasilan beberapa daya tarik wisata di atas, telah membuktikan bahwa pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) telah mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat lokal, dan kebijakan pengelolaan pariwisata tidak semata dilakukan oleh pemerintah (*top down*), tetapi atas inisiatif masyarakat lokal (*bottom up*).

3. Penutup

Pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) merupakan solusi dalam menjawab berbagai isu negatif tentang pengelolaan industri pariwisata selama ini, pariwisata pada awalnya oleh sebagian kalangan dianggap sebagai “perusak” sumber daya alam dan budaya, namun di beberapa objek daya tarik wisata di Bali telah terbukti mampu memberikan manfaat ekonomi bagi kehidupan masyarakat lokal, memberikan manfaat bagi pelestarian budaya lokal, maupun bermanfaat bagi kelestarian lingkungan alam, dimana masyarakat lokal mulai menyadari akan pentingnya kebersihan, keindahan dan kelestarian sumber daya alam dan budaya sebagai bagian dari suguhan atraksi wisata.

CBT menawarkan konsep agar *ownership* (kepemilikan) sumber daya, *management* (pengelolaan), dan *control* (pengawasan) secara substansial benar-benar berada di tangan masyarakat lokal melalui komunitas lokal seperti lembaga adat/*desa pakraman*, sehingga masyarakat lokal tidak hanya sebagai penonton semata, namun serta-merta menjadi pelaku dan penikmat hasil dari industri pariwisata.

Daftar Pustaka

Akama, J.S and Kieti, D, 2007, “Tourism and Socio-economic Development in Developing Countries: A Case Study of Mombasa Resort in Kenya”, *Journal of Sustainable Tourism*, Vol. 15, No. 6, pp. 735-48.

Archer, B. and Cooper, C. 1994. “The Positive and Negative Impacts of Tourism”. Pp. 73 -91 in W.F. Theobald (ed.) *Global Tourism: The Next Decade*, Butterworth - Heinemann, Oxford.

Aref., F. Redzuan, M. 2009. *Community Capacity Building for Tourism Development*, *Journal of Hum. Ecology*.

Asker, S., Boronyak. L., Naomi, C. 2010. *Effective Community Based Tourism*, Asia Pacific Ec. Cooperation.

Breugel., L. 2013. *Community-based tourism: Local participation and perceived impacts A comparative study between two communities in Thailand*. Research Master Social and Cultural Science , Faculty of Social Sciences. Radboud University Nijmegen.

Hatton, Michael.J. 1999 . *Community Based Tourism In The Asia-Pacific*. OPEC Publication

Hausler, Nicole. 2005. *Planning for Community Based Tourism*. Sumber: repository.upi.edu/21562/9/S_MPP_1202549_Bibliography.pdf. Diakses 22/02/2018

Indonesia Investments, 2018. Sumber: <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/industri-sektor/pariwisata/item6051>. Diakses : 22/02/2018.

Nurhidayati, Sri Endah. 2012. Sumber: http://endah-parwis-vokasi.web.unair.ac.id/artikel_detail-70079-Artikel. Diakses: 12/02/2018.

Pesona Travel, 2017. Sumber: <http://www.pesona.travel/berita/detail/bali-raih-the-worlds-best-destination-with-travellers-choice>. Diakses: 12/02/2018.

Putra, I Nyoman Darma. 2015. Pariwisata Berbasis Masyarakat Model Bali. Denpasar: Program Magister Kajian Pariwisata Universitas Udayana.

Suansri, Potjana. 2003. Community Based Tourism Handbook. Thailand : Rest Project.

UNEP and WTO. 2005. Making Tourism, Change, Impact, and Opportunities. Sumber: <http://endah-parwis-fisip.web.unair.ac.id>. Diakses : 22/02/2018.